

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang KPK

UUD 1945 BAB VII pasal 20 ayat (1-5) tentang kewenangan DPR dalam merancang Undang-undang

Undang-Undang RI No. 10 tahun 2004 pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat (1-12)

Undang–undang No 30 tahun 2003 tentang KPK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan KPK

Undang-undang No 19 Tahun 2019 RUU ke-2 tentang Kewenangan KPK

Buku

Ashiddiqie Jimlys, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusional Press, 2005), h. 211.

Bungin Burhan (Ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada,2004),hal 43.

Dwi Yuni JF, *Undang-Undang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. (Gelangpress, 2009) cetakan ke-1.

Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 245-275.

Indrayana Denny, *Jangan Bunuh KPK: kajian hukum tata negara penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Fakultas Hukum UGM: Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch(ICW) [dan] PUKAT Korupsi, 2016) h. 192-193

Kartayasa Mansyur, *KORUPSI & Pembuktian Terbalik* (jakarta: Kencana, 2017) edisi pertama.

Moeloeng Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rodakarya, 2005), hal 6.

Manan Abdul, *Dinamika Politik Hukum diIndonesia*, jakarta: Kencana 2018. Edisi ke-1 hal-1

Mapiasse Syarief, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Jakarta Prenada Group, 2017, cet ke-1, hal-25

Farida Maria Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Kaniusus, jakarta 2017 hal:2

Napitulu Diana, *KPK IN ACTION*. Cet ke-1 *Raih Asa Sukses*. Jakarrta 2010, Hal 323-325

P.pius Abdillah dan Dahlan M, *kamus ilmiah populer lengkap*, surabaya arkloss,tt

Ridho Zainor M, *Pengantar Ilmu Politik*, Serang , LP2M UIN SMH Banten 2017, hal 17

Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung Pustaka Setia, 2012 hal 60-61

Pedoman penulisan skripsi fakultas syariah UIN SMH banten tahun 2019.

Jurnal

Bidang Info Singkat (*kajian singkat terhadap isu actual dan strategis*). Vol.XI.No.18/II/ puslit/ september 2019

Lalola Easter & Emerson Yantho (*public Review Terhadap Rancangan Modul_Kelembagaan_ KPK_ UMUM_ OK* Jurnal

Trias palupi kurnianingrum Bidang Info Singkat (*kajian singkat terhadap isu actual danstrategis*). Vol.XI.No.18/II/puslit/september 2019

Blogspot

Eka Martiana Wulansari, politik hukum perubahan kedua UU KPK. 10 maret 2016

Fitria, Eksistensi KPK sebagai lembaga penunjang

Fina, (*public review*) terhadap rancangan UU tentang komisi pemberantasan tipikor

Ibnu Aziz (*tirto.id – ibn/abd*) 30 september 2019.

Yulaika Ramadhani, isi perubahan pasal pasal Revisi UU KPK yang akan di sahkan DPR (*tirto.id*) 17 september 2019

Skripsi

Peranan KPK sebagai penuntut dalam penanganan tindak pidana korupsi

(Nova Hapsari, UIN Surakarta) 2011.

Skripsi : Peranan KPK sebagai penuntut dalam penanganan tindak pidana korupsi (Nova Hapsari, UIN Surakarta) 2011.

Website

Jefry Nandy, “Tolak RUU KPK, Mahasiswa Demo DPR”, <http://m.detik.com>
> news, Kamis, 19 September 2019, pukul 14:31 WIB, h. 3

Evaluasi Roadmap Penegakan hukum KPK”, <http://www.kilasberita.com>,
(jakarta2012-2015), hal 7

Agung Nugraha “Mengilala Drwya Haji (sebutan pegawai negeri simbol kebebasan raja jawa kuno)” <http://kekunaonan.com>, diakses pada, 2 februari 2020, pukul 15:00 WIB

Modul Materi Kelembagaan KPK untuk umum” <http://www.republika.co.id>, diakses pada 6 jully 2019, pukul 08:00 WIB, Hal-7.

Chandra Gian Asmara, “JK buka-bukaan tentang revisi UU KPK”, <https://www.cnbcindonesia.com>, Jakarta, diakses pada, selasa 10 Oktober 2019, pukul 06:05 WIB.

- R Shaphely “Keberadaan Korupsi Pemberantas Korupsi dalam System ketatanegaraan dan Implikasinya terhadap kewenangan kejaksaan dan kepolisian RI” <http://www.media.neliti.com>, diakses pada 26 februari 2016, h 6
- data eksistensi kewenangan KPK” <http://www.eksistensikpk.go.id/detiknews/berita>, Kamis 05 September 2019 11:41 WIB
- Petisi Revisi UU KPK” <http://www.petisiluringkpk.change.org>, diakses pada Jumat, 6 September 2019, pukul, 17:57 WIB
- Petisi Luring guru besar Indonesia”, <http://www.luringgurubesarindonesia.detiknews.com>, diakses pada Minggu 8 September 2019, pukul 18:00 WIB.
- “Pelemahan KPK”, <http://www.pelemahankpk.tribunnews.com>, diakses pada, Rabu 11 September 2019, pukul 18:00 WIB.
- Survei Persetujuan Revisi UU KPK”, <http://www.surveiuukpk.liputan6.com>, diakses pada Senin, 16 September 2019, pukul 18:00 WIB
- Presidan Buka Suara Soal KPK”, <http://www.suarapembaruanpresiden.com>, diakses pada Senin 16 September 2019, pukul 17:57 WIB.
- Dipna Videlia Putsanra, revisi uu yang di masalahkan, <https://www.tirto.id>, 25 September 2019.
- “DPR resmi sahkan uu KPK”, <https://www.dprsahkanuukpk.m.cnnindonesia.com> . Selasa, 17 September 2017 12:58 WIB.
- pokok pandangan pemerintah soal revisi UU KPK”, <http://m.mediaindonesia.com>, diakses pada, Selasa 13 September 2019, pukul 00:54 WIB
- RUU KPK Diresmikan” <https://www.kalteng.antarnews.com>. Diakses pada Rabu 11 September 2019, pukul 20:24 WIB
- Perubahan RUU KPK” <https://www.cnbciindonesia.com/Redaksi/perubahanRUUKPK>, diakses pada, Senin 16 September 2019, pukul 20:04 WIB